

KEBIJAKAN DEPORTASI ISRAEL TERHADAP PENDATANG ILEGAL BERKEBANGSAAN AFRIKA

Rhafa Jireh Geraldio B.¹⁾, D. A. Wiwik Darmiasih²⁾, Putu Adi Putra Suwecawangsa³⁾

¹²³⁾Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: rhafajireh@student.unud.ac.id¹⁾, wiwik@unud.ac.id²⁾, adisuwecawangsa@yahoo.co.id³⁾

ABSTRACT

The issue of refugees is an issue that continues to grow and has significant impact on a country. A state has the ability to deport refugees in their country. Israel has decided to deport African refugees who are predominantly Eritrean and Sudanese. The Deportation policy of Israel was carried out after the number of refugees from Africa in the country continued to grow. Israel sees African refugees coming illegally to their country. The Refugees who came also received negative responses due to the impact they caused inside Israel. This research analyzes the reasons of Israel's deportation policy towards African refugees. The data is collected from various network sites, scientific research, journals, news, and articles related to this research. The concept uses is National Security and Securitization. This research focuses on Israel's decision to create a deportation policy to secure its national security from African refugees residing in its country.

Keywords: *Israel's deportation policy, African refugees, Security*

1. PENDAHULUAN

Pengungsi merupakan salah satu isu keamanan kontemporer dalam kajian Hubungan Internasional. Pasca Perang Dingin, banyak literatur yang menggambarkan pengungsi sebagai sebuah masalah keamanan negara (Loescher, 1992). Berdasarkan data dari UNHCR (2017) terdapat 65,5 juta orang yang harus terpaksa berpindah negara di seluruh dunia. Israel merupakan salah satu negara penerima pengungsi karena telah meratifikasi Konvensi PBB tahun 1951. Pengungsi yang masuk ke Israel sebagian besar berasal dari daratan Afrika yang didominasi warga negara Eritrea dan Sudan. Israel dalam menangani para pengungsi terutama pendaftar suaka politik non-Yahudi, menerapkan kriteria hukum

internasional yang mengacu pada obligasi perjanjiannya dan mengklaim bahwa Israel tunduk pada prinsip *non-refoulement*.

Prinsip *non-refoulement* adalah sebuah prinsip yang melindungi para pengungsi atau pengungsi dari pengusiran atau pengembalian ke tempat-tempat yang mengancam nyawa atau kebebasan mereka seperti ras, agama, dan kebangsaan (UN Convention relating to the Status of refugees Art. 33(1), 1951). Terlepas dari prinsip tersebut, Israel secara tradisional terus memertahankan kebijakan imigrasi terbatasnya. Walaupun Israel telah menandatangani berbagai konvensi serta telah berkomitmen untuk melindungi para pengungsi, Israel mengklaim bahwa 99 persen orang Afrika yang pindah ke negaranya disebabkan oleh

alasan ekonomi dan dianggap sebagai penyusup ilegal dan bukan pengungsi asli (Nichols & Jacobsen, 2011). Pada Maret 2015, Menteri Dalam Negeri Israel mengumumkan bahwa pengungsi asal Eritrea dan Sudan yang tidak memiliki klaim suaka sementara dan yang tidak setuju untuk meninggalkan Israel secara sukarela ke negara yang telah ditentukan akan ditahan (Zonszein, 2105). Pada awal tahun 2018, Pemerintah Israel mengeluarkan perintah pengusiran terhadap ribuan pengungsi asal Afrika yang dipicu oleh munculnya konflik dengan masyarakat lokal. Pemerintah Israel memutuskan untuk mendeportasi pengungsi asal Afrika dengan memberikan kompensasi berupa uang sejumlah 3.500 USD dan tiket pesawat (Kershner, 2018). Pada tanggal 1 Januari 2018, Menteri Dalam Negeri Israel, Aryeh Deri, mengumumkan bahwa setiap para pengungsi yang datang mencari suaka untuk memperbarui visa dan tidak termasuk dalam daftar pengecualian akan diberitahukan untuk meninggalkan Israel dalam jangka waktu 60 hari.

2. KAJIAN PUSTAKA

Peneliti menggunakan dua tulisan sebagai Tinjauan Pustaka. Tulisan pertama merupakan karya dari Elizabeth Ferris dan Kemal Kirişci tahun 2016 yang berjudul *The Consequences of Chaos*. Tulisan Ferris dan Kirişci (2016) menjabarkan jumlah pengungsi yang terus meningkat di Turki hingga mencapai 2,5 juta orang di akhir Desember tahun 2015. Krisis pengungsi yang memburuk

memperdalam permasalahan sosial, ekonomi dan politik di Turki. Pertumbuhan yang massal dalam jumlah pengungsi di luar kamp pengungsian dan bantuan kebijakan yang kurang memadai terhadap pengungsi telah memperburuk berbagai permasalahan sosial seperti akses tempat tinggal dan layanan dasar seperti pendidikan dan perawatan kesehatan.

Ferris dan Kirişci (2016) berargumen bahwa berdasarkan permasalahan yang muncul serta beban keuangan yang besar bagi Turki sebagai suatu ancaman bagi stabilitas negara penerima pengungsi. Pemerintah Turki kemudian mengeluarkan kebijakan untuk tidak memberikan para pengungsi asal Suriah status sebagai pengungsi atau juga mengizinkan mereka untuk tetap berada di negara Turki dalam jangka waktu yang lama. Ferris dan Kirişci (2016) menggunakan konsep keamanan nasional (*national security*) dari Barry Buzan yang tergambar dalam penjelasan perihal respon Pemerintah Turki terhadap pengungsi yang datang.

Tinjauan pustaka kedua yang Peneliti gunakan merupakan tulisan karya Balaram & Cherti (2013) yang berjudul *Returning Irregular Migrants is Deportation The UK's Only Option*. Tulisan Balaram & Cherti (2013) menjabarkan bahwa perkiraan jumlah migran tidak teratur atau tidak sah di Inggris adalah salah satu yang terbesar di antara negara Uni Eropa lainnya. Inggris menggunakan tiga metode berbeda untuk melakukan pengembalian bergantung pada bagaimana migran melanggar hukum yang ada. Tiga kebijakan itu adalah penyingkiran migran yang masuk tidak melalui

jalur hukum yang sah di perbatasan, penyingkiran secara administratif, dan deportasi. Inggris telah menahan antara 2.000 hingga 3.000 migran di fasilitas-fasilitas terbesar di Eropa (Silverman dan Hajela dalam Balaram & Cherti, 2013). Pemerintah Inggris sangat fokus dalam mengurangi jumlah migran gelap dengan berbagai cara. Balaram & Cherti (2013) menggunakan konsep sekuritisasi (*securitization*) dari Eroukhmanoff dalam melihat respon Pemerintah Inggris yang menjadikan kedatangan migran gelap atau tidak tetap sebagai suatu permasalahan keamanan negara dan berusaha keras untuk menanganinya.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif. Penelitian yang menggunakan format deskriptif kualitatif dalam buku *Metode Penelitian Kualitatif* oleh Prof. Burhan Bungin (2014) bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena yang ada menjadi suatu objek penelitian dan berusaha menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder seperti literatur ilmiah berupa buku, jurnal, media massa daring, situs resmi, serta literatur-literatur karya akademisi yang berhubungan dengan penelitian ini.

Peneliti dalam analisis ini berfokus pada Pemerintah Israel yang mengeluarkan kebijakan deportasi terhadap pengungsi yang menjadi objek penelitian. Penelitian ini dengan jelas sebagaimana ditekankan pada kalimat awal berfokus pada pemerintahan atau negara sehingga level analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah negara.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu teknik pengumpulan data mengenai permasalahan dalam penelitian dengan membaca literatur yang mendukung, seperti buku-buku, jurnal ilmiah dan melalui situs-situs resmi organisasi atau berita di internet mengenai kebijakan deportasi negara Israel terhadap pengungsi.

Peneliti menyusun data-data yang ada secara runut dengan didukung oleh penggunaan gambar seperti misalnya gambar pengungsi yang berada di Israel serta tabel data atau grafik batang seperti jumlah pengungsi pertahunnya di Israel dan lainnya yang didukung dengan penjabaran-penjabaran yang diperlukan sehingga analisis yang diberikan dapat dimengerti dengan lebih baik dan menarik.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Israel merupakan sebuah negara yang terletak di Timur Tengah tepatnya di pantai timur Laut Mediterania (History, 2018). Letak Israel yang strategis telah menyebabkan negara tersebut menjadi tujuan banyak pengungsi dari seluruh dunia. Beberapa pengungsi tersebut

terutama berasal dari Eritrea dan Sudan, serta beberapa negara Sub-Sahara Afrika (The America Team for Displaced Eritreans, n.d.).

Terdapat dua daya tarik yang menjadi alasan para pengungsi asal Afrika memilih Israel sebagai negara tempat mereka mengungsi. Daya tarik tersebut adalah ideologi dan ekonomi. Beberapa pengungsi yang masuk ke Israel merupakan pengungsi yang beragama Yahudi (Kaplan, n.d.). Israel yang berideologi Yahudi (The Knesset, n.d.) menerima banyak pengungsi Yahudi dari seluruh dunia. Setelah berakhirnya Perang Dunia II, antara tahun 1945 dan 1948, Israel telah menerima 140.000 penyintas *Holocaust* selama tahun pertamanya sebagai negara merdeka (United States Holocaust Memorial Museum, n.d.). *Holocaust* merupakan istilah yang mengacu pada pembunuhan sistematis lebih dari enam juta orang Yahudi yang didalangi oleh Adolf Hitler dan Partai Sosialis Nasionalis (Nazi) di Eropa selama Perang Dunia II (Jewish Virtual Library, n.d.). Israel selain menerima pengungsi Yahudi asal Jerman juga menerima banyak pengungsi Yahudi asal Ethiopia. Pengungsi Yahudi asal Ethiopia melarikan diri dari negaranya melalui Sudan dan tiba di Israel di awal tahun 1980an. Pengungsi Yahudi asal Ethiopia datang karena adanya persekusi etnis dan penahanan politik yang dialami. Mereka tiba di Israel dalam tiga gelombang (Finklestein, M. & Solomon, Z., 2009). Pengungsi gelombang pertama dikenal dengan *The Moses Immigrants*. Pengungsi pertama ini datang di tahun 1984 hingga 1985 dikarenakan adanya persekusi agama, kelaparan dan perang saudara (Mekelberg, Y.,

2015). Gelombang kedua dinamakan *The Solomon Immigrants*, Pengungsi pada gelombang ini tiba di Israel di tahun 1991. Gelombang ketiga para pengungsi Yahudi asal Ethiopia disebut dengan *The Family Reunion Immigrants*. Pengungsi pada gelombang ketiga tiba di Israel di tahun 1995.

Daya tarik lain selain ideologi yang dimiliki oleh Israel adalah ekonomi. Israel merupakan negara dengan perekonomian yang secara fundamental sehat dan dinamis walaupun di tahun 2006 Israel berperang dengan Hizbullah di Libanon dan juga kampanye militernya terhadap Hamas di Gaza serta ancaman teroris yang terus menerus ada (The Heritage Foundation, n.d.). Israel adalah salah satu pasar ekonomi yang paling tangguh dan paling maju di dunia. Israel salah satu negara dengan Produk Domestik Bruto tertinggi di dunia menjadikannya salah satu negara paling makmur dan kaya di Kawasan Timur Tengah (Amnesty International, 2018). Israel secara konsisten menempati peringkat tinggi di antara ekonomi dunia lainnya dalam hal kesiapan teknologi, ketersediaan modal ventura, dan kualitas organisasi penelitian yang dimiliki (Consulate General of Israel to the Pacific Northwest San Fransisco, n.d.). Tahun 2017 Israel memiliki pendapatan per kapita sebesar 41.541 USD (Focuseconomics, 2019).

Menurut Pemerintah Israel, imigran asal Afrika bukanlah pengungsi melainkan migran ekonomi yang melihat Israel sebagai sebuah negara tujuan yang menarik dikarenakan Israel merupakan negara berkembang terdekat di mana mereka dapat mencari pekerjaan (Galpin,

2014). Pemerintah Israel memandang para pengungsi asal Afrika yang datang ke negaranya untuk mencari penghidupan ekonomi sebagai sebuah permasalahan. Hal itu dikarenakan para pengungsi asal Afrika tersebut dianggap membahayakan karakter Yahudi yang dimiliki Israel (Creighton, 2018). Israel memiliki banyak pengungsi asal Afrika seperti dari Negara Eritrea dan Negara Sudan (Refugees International, 2018). Para pengungsi asal Afrika bermigrasi melintasi Semenanjung Sinai untuk menuju Israel. Tujuan para pengungsi tersebut ke Israel adalah untuk mencari suaka dan pekerjaan. Kedatangan pengungsi asal Afrika ke Israel terjadi sejak tahun 2006 (Human Rights Watch, 2008). Tahun 2008 pengungsi asal Afrika di Israel telah berjumlah 17.000 orang. Jumlah pengungsi asal Afrika di Israel meningkat secara signifikan hingga akhir tahun 2010. Jumlah tersebut melonjak hingga mencapai 33.273 orang pengungsi. Jumlah kedatangan pengungsi asal Afrika tersebut menjadi jumlah yang terbesar yang pernah diperoleh Israel (Hotline for Migrant Workers, 2010).

Pengungsi asal Eritrea dan Sudan merupakan dua kelompok pengungsi asal Afrika terbesar yang ada di Israel. Para pengungsi yang berasal dari dua negara tersebut kebanyakan memiliki perlindungan sementara dalam bentuk *2A5 conditional release visa* yang dapat diperbarui setiap tiga bulan sekali (Nichols & Jacobsen, n.d.). Perlindungan sementara tersebut dapat dicabut sewaktu-waktu. Secara resmi pengungsi yang mendapatkan perlindungan sementara atau

merupakan pemegang visa 2A5 tidak diizinkan untuk bekerja (The Jewish Federations of North America, 2018). Para pengungsi asal Afrika berupaya untuk memperoleh pekerjaan di Israel sebagai ganti biaya perjalanan mereka. Uang tersebut biasanya mereka dapatkan dari pinjaman teman atau keluarga. Hutang yang menjerat para pengungsi tersebut membuat mereka berusaha keras untuk mencari pekerjaan setibanya mereka di Israel (Nichols & Jacobsen, n.d.). Oleh karenanya, Pemerintah Israel mengklaim bahwa mayoritas dari pengungsi asal Afrika yang memasuki Israel adalah migran ekonomi daripada pengungsi. Pernyataan Pemerintah Israel ini juga didukung oleh pernyataan banyak pengungsi yang menjadi responden yang mengatakan bahwa mereka datang ke Israel dikarenakan mereka tidak mampu mendukung atau membiayai secara finansial keluarga mereka di Eritrea dan Sudan (Nichols & Jacobsen, n.d.).

Israel melalui berbagai kebijakan dalam negerinya tidak mampu mencegah kedatangan pengungsi asal Afrika terutama yang datang secara ilegal. Kedatangan pengungsi asal Afrika dalam jumlah besar membuat Pemerintah Israel menyiapkan kebijakan yang dirasa efektif untuk mencegah kedatangan mereka terutama yang masuk dengan cara ilegal. Jumlah pengungsi asal Afrika yang besar di Israel memberi pengaruh bagi kehidupan ekonomi, sosial dan politik di negara tersebut. Pemerintah Israel secara ekonomi harus menanggung beban biaya untuk mengatur para pengungsi. Setiap tahunnya, Pemerintah Israel harus mengeluarkan biaya sebesar 260 juta

USD untuk mengurus para pengungsi asal Afrika (Lior, 2016). Pemerintah Israel juga harus membangun pusat detensi untuk para pengungsi yang masuk secara ilegal ke Israel (Lidman, 2018). Pembangunan pusat detensi tersebut juga menghabiskan biaya yang cukup besar. Sebagai contoh, Pusat Detensi Holot yang berada di dekat perbatasan Mesir dibangun dengan biaya sekitar setengah miliar Syikal Israel (NIS) atau 94 juta USD (Skop, 2014). Biaya tersebut belum termasuk biaya tambahan dari biaya operasional harian (Livi & Rozen, 2014). Biaya operasional harian Pusat Detensi Holot menghabiskan dana sebesar seperempat miliar Shekel atau 72 juta USD (Yaron, 2018).

Pengungsi asal Afrika yang berada di Israel juga memberi pengaruh bagi kehidupan sosial masyarakat Israel. Banyak penduduk Tel Aviv Selatan yang pindah dari kotanya karena ketakutan terhadap berbagai pelanggaran hukum yang dilakukan pengungsi asal Eritrea dan Sudan (Israel, 2017). Berbagai pelanggaran hukum yang dimaksud seperti pemerkosaan, penyerangan, pencurian dan kejahatan lainnya. Jumlah gabungan dari tindakan kriminal pengungsi asal Eritrea dan Sudan di tahun 2012 dan 2013 mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya yang mana telah mencapai lebih dari 50 persen dan dengan jumlah itu menjadikannya sebagai yang tertinggi dibanding orang asing lainnya di Israel. Pengungsi asal Eritrea dan Sudan memiliki tingkat kriminalitas tertinggi dibanding penduduk asing lainnya di Israel (Alon, 2018). Data kepolisian Israel menunjukkan kejahatan

yang dilakukan para pengungsi asal Eritrea dan Sudan biasanya terkait dengan penyerangan seksual, kekerasan dan ranah properti. Tahun 2017, pengungsi asal Eritrea dan Sudan memiliki kasus kejahatan seksual sebesar 4,3 kali lipat lebih banyak daripada masyarakat umum Israel, 3,5 kali lipat lebih banyak dalam kasus kekerasan, dan 3,1 kali lipat lebih banyak pada kasus properti (Alon, 2018). Tahun 2017, tercatat sebanyak 72 serangan seksual, 354 kasus kekerasan, dan 402 kasus perusakan properti yang dilaporkan dilakukan oleh pengungsi berkebangsaan Eritrea dan Sudan (Deane, 2018). Survei yang dilakukan oleh Polisi Israel di tahun 2015 menyebutkan bahwa hanya 38 persen penduduk Tel Aviv Selatan yang merasa aman ketika berada di luar rumah setelah malam tiba. Hasil survei tersebut juga memperlihatkan bahwa hanya 43 persen penduduk Tel Aviv Selatan yang merasa aman untuk meninggalkan rumah saat malam hari (Israel, 2017). Para pengungsi asal Eritrea dan Sudan juga terlibat dalam kasus prostitusi di Israel (Lee, 2017). Kumpulan pemuda pengungsi asal Eritrea dan Sudan yang membanjiri Pantai Tel Aviv juga melakukan pencurian terhadap alat-alat mandi dan dompet para pelancong di pantai kemudian menjualnya di Stasiun Bus Pusat Kota (Kubovich, 2012). Para pengungsi tersebut juga banyak yang terlibat dalam kasus pencurian sepeda yang kemudian dijual di jalanan utama Tel Aviv (Weiss, 2018).

Kebanyakan pengungsi asal Afrika yang berada di Israel didominasi oleh orang-orang berkebangsaan Eritrea dan Sudan. Para

pengungsi asal Eritrea dan Sudan tersebut pindah secara ilegal ke daerah pusat urban Israel seperti Tel Aviv dan sebagian besar lainnya tinggal di Eilat, Rishon Letziyon, dan Netanya (The Jewish Federations of North America, 2018). Hal tersebut mengakibatkan perubahan signifikan terhadap demografi kependudukan dan terjadinya gesekan sosial dengan penduduk lokal Israel yang tinggal di daerah tersebut. Beberapa daerah di Israel melaporkan terjadinya serangan terhadap para pengungsi asal Eritrea dan Sudan akibat meningkatnya aktivitas kriminal dan vandalisme (The Jewish Federations of North America, 2018). Berbagai dampak negatif yang dihasilkan oleh pengungsi Eritrea dan Sudan memunculkan berbagai gelombang protes dari masyarakat Israel.

Ratusan penduduk Tel Aviv Selatan mengadakan demonstrasi untuk memprotes kehadiran para pengungsi dan orang asing yang menetap di lingkungan mereka di tahun 2010 (Lior, 2010). Para penduduk meminta agar para penyusup tidak boleh menyewa apartemen (Polak, 2010). Warga Israel menyampaikan ketidaknyamanan mereka terhadap peningkatan kejahatan yang dilakukan imigran asal Afrika, pelecehan yang dialami wanita Israel dan membuat ruang publik tidak nyaman (Yemini, 2017).

Berbagai protes yang dilakukan oleh warga Israel kemudian mulai mendapat perhatian secara politis. Sejumlah aktivis sayap kanan yang tidak tinggal di Tel Aviv ikut bergabung dalam protes tersebut (Lior, 2010). Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu

yang menyalahkan orang Afrika atas kejahatan di Israel mendapat dukungan dari anggota koalisi sayap kanannya termasuk Menteri Budaya dan Olahraganya, Miri Regev (Berger, 2018). Para pejabat Israel kemudian meminta pemerintah untuk mengembalikan kedamaian dan ketenangan di wilayah Tel Aviv Selatan sebagai sebuah tugas nasional terutama untuk melindungi karakter Yahudi dan Demokrasi di Israel. Miri Regev, anggota dari Partai Likud atau partai yang sama dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, mengatakan bahwa imigran asal Afrika menimbulkan ancaman demografis yang serius bagi Israel (Greenwood, 2012).

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menanggapi tuntutan para pengunjuk rasa dengan mengeluarkan tiga tahap kebijakan dalam mengatasi isu imigran di negaranya (Berger, 2017). Tahap pertama adalah menghentikan kedatangan para pengungsi dengan membangun pagar pembatas dan memberlakukan undang-undang *Prevention of Infiltration Act* (The Jewish Federations of North America, 2018) yang sepenuhnya menghalangi kehadiran pengungsi. Tahap kedua adalah penghapusan pengungsi yang dilakukan melalui deportasi. Tahap ketiga adalah penghapusan secara signifikan terhadap pengungsi asal Afrika yang berada di Israel sebagai kelanjutan dari tahapan kedua (Berger, 2017). Mayoritas warga Israel mendukung apa yang dilakukan oleh Pemerintah Israel. Pembangunan pagar pembatas di akhir tahun 2012 kemudian mengakhiri secara perlahan kedatangan para pengungsi asal Afrika. Tahun

2017 kedatangan pengungsi Afrika telah berhenti sepenuhnya yang ditunjukkan dengan jumlah kedatangan pengungsi Afrika saat itu yang berjumlah nol.

Pemerintah Israel dalam tahapan kedua kebijakannya untuk mengatasi permasalahan pengungsi ilegal asal Afrika memberlakukan deportasi. Tahun 2015, sebanyak 12.424 orang pengungsi dibawa masuk ke dalam fasilitas Pusat Detensi Holot (ASSAF, 2016). Pada September 2015, Pemerintah Israel mengeluarkan panduan dasar baru yang mengizinkan pemerintah untuk memenjarakan setiap pria yang dianggap penyusup di Pusat Detensi Holot selama satu tahun terlepas dari kapan tanggal kedatangan mereka (HIAS, n.d.).

Otoritas Imigrasi Israel kemudian mengumumkan bahwa pemerintah akan mulai mendeportasi para pencari suaka asal Eritrea dan Sudan ke negara-negara ketiga yang tidak disebutkan namanya. Otoritas Israel mengirim surat kepada 45.000 orang asal Eritrea dan Sudan di Israel yang memberi mereka waktu 30 hari untuk menerima tawaran Israel sebesar 3.500 USD dalam bentuk tunai dan tiket sekali jalan pulang atau ke negara ketiga yang tidak disebutkan namanya di Afrika. Jika mereka tidak menerima tawaran pemerintah tersebut, maka mereka akan menghadapi penahanan di penjara Saharonim (Booth, 2015).

Kementerian Dalam Negeri Israel pada tanggal 1 Januari 2018 mengumumkan rencana untuk memindahkan secara paksa para pencari suaka atau pengungsi ilegal di Israel ke negara ketiga (HIAS, n.d.). Bulan Februari di tahun yang sama, Pemerintah Israel mulai

mengeluarkan perintah deportasi kepada beberapa orang yang memperbarui visa mereka serta memberi mereka waktu 60 hari untuk mengambil uang yang ditawarkan oleh pemerintah untuk meninggalkan Israel. Jika mereka menolak, maka mereka dapat dipenjara. Sejak awal 2018, sebanyak 398 pencari suaka asal Eritrea dan 49 pencari suaka asal Sudan telah setuju untuk pergi dari Israel dengan bantuan uang tunai yang dijanjikan pemerintah. Lidman (2018) dalam tulisannya menyebut 102 orang memilih kembali ke negara asal mereka dan sebanyak 104 orang pergi ke negara Uganda dan Rwanda, sedangkan sisanya dimukimkan kembali ke negara lain. Sabine Hadad, juru bicara Otoritas Kependudukan Israel, mengatakan program pemukiman kembali yang diberlakukan telah membuat lebih dari 20.000 pencari suaka meninggalkan Israel ke negara ketiga. Negara ketiga yang dimaksud tidak hanya Rwanda dan Uganda, tetapi juga Amerika Serikat dan Kanada (Lidman, 2018).

Pemerintah Israel menyebut para pengungsi asal Eritrea dan Sudan sebagian besar merupakan migran ekonomi dan tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan status pengungsi (The Jewish Federations of North America, 2018). Faktor sosial atau masyarakat, politik, dan ekonomi yang memunculkan ancaman di Israel sesuai dengan faktor-faktor yang disebutkan oleh McGlinchey (2017). Israel kemudian mengambil keputusan berdasarkan ancaman dari faktor-faktor yang membuat kebijakan deportasi. Hal ini merupakan satu bentuk sekuritisasi Israel. Pengungsi Afrika

yang merupakan target dari kebijakan ini dipandang sebagai sumber ancaman yang memengaruhi beberapa faktor yang disebutkan oleh McGlinchey. Ancaman ini kemudian dipandang sebagai sebuah permasalahan kemanan nasional oleh Israel.

5. KESIMPULAN

Hasil analisis dari penelitian ini memberikan gambaran tentang kebijakan suatu negara dalam melindungi negaranya dari ancaman keamanan kontemporer seperti pengungsi. penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan deportasi Israel merupakan hasil sekuritisasi Israel dari ancaman-ancaman yang ditimbulkan oleh para pengungsi ilegal asal Afrika. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan berdasarkan pada keinginan untuk melindungi keamanan nasional Israel.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Amnesty International. (2018). *Israel: Deportation of African asylum-seekers is a cruel and misguided abandonment of responsibility*. Amnesty International. Diakses pada 15 Maret 2019, melalui <<https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/03/israel-deportation-of-african-asylum-seekers-is-a-cruel-and-misguided-abandonment-of-responsibility/>>.
- ASSAF. (2016). *Asylum-Seekers in Israel: Background and Figures*. Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel (ASSAF). Diperoleh pada 15 Maret 2019, melalui <<http://assaf.org.il/en/sites/default/files/Asylum-Seekers%20in%20Israel%20Background%20and%20Figures%20June%202016.pdf>>.
- Berger, M. (2018). *Inside Israel's campaign to deport tens of thousands of African migrants*. Diakses pada 1 April 2019, melalui <<https://www.vox.com/world/2018/3/6/17059744/israel-deport-african-migrants-asylum>>.
- Berger, R. (2017). *Israel Moves to Deport 40,000 African Migrants*. VOA. Diakses pada 15 Maret 2019, melalui <<https://www.voanews.com/a/israel-moves-deport-african-migrants/4126676.html>>.
- Booth, W. (2015). *Israeli government to refugees: Go back to Africa or go to prison*. The Washington Post. Diakses pada 15 Maret 2019, melalui <https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/toughening-its-stance-toward-migrants-israel-pushes-africans-to-leave/2015/05/14/e1637bce-f350-11e4-bca5-21b51bbdf93e_story.html?utm_term=.f0f939e12eee>.
- Cherti, M. & Balaram, B. (2013). *Returning Irregular Migrants is Deportation The UK's Only Option*. Institute for Public Policy Research.
- Consulate General of Israel to the Pacific Northwest San Fransisco. (n.d.). *The Israeli Economy Today*. Consulate General of Israel to the Pacific Northwest San Fransisco. Diakses pada 14 Maret 2019, melalui <<https://embassies.gov.il/san-francisco/AboutIsrael/Economy/Page/About-Israeli-Economy-Today.aspx>>.
- Creighton, C. (2018). *African Migrants reel as Israeli law cuts into their salaries*. The Times of Israel. Diakses pada 7 Maret 2019, melalui <<https://www.timesofisrael.com/african-migrants-reel-as-israeli-law-cuts-into-their-salaries/>>.

- Deane, Yvette J. (2018). *Eritrean and Sudanese Crime Data Released for First Time in Five Years*. The Jerusalem Post. Diakses pada 15 Maret 2019, melalui <<https://www.jpost.com/Israel-News/Eritrean-and-Sudanese-crime-data-released-for-first-time-in-five-years-574525>>.
- Diakses pada 15 Maret 2019, melalui <<https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-5336564,00.html>>.
- Eroukhanoff, C. dalam McGlinchey, S., Walters, R., Scheinplug, C. (2017). *International Relations Theory*. E-International Relations Publishing.
- Ferris, E. & Kirişci, K. (2016). *The Consequences of Chaos*. Brookings Institution Press.
- Finklestein, M. & Solomon, Z. (2009). *Cumulative Trauma, PTSD and Dissociation Among Ethiopian Refugees in Israel*. Routledge. Diperoleh pada 9 Januari 2019, melalui <<http://dx.doi.org/10.1080/15299730802485151>>.
- Focuseconomics. (2019). *Israel Economic Outlook*. Focuseconomics. Diakses pada 14 Maret 2019, melalui <<https://www.focus-economics.com/countries/israel>>.
- Galpin, R. (2014). *Protests throw spotlight on Israel's African migrant pressures*. BBC News. Diakses pada 14 Maret 2019, melalui <<https://www.bbc.com/news/world-middle-east-25757714>>.
- Greenwood, P. (2012). *Israeli anti-immigration riots hit African neighbourhood of Tel Aviv*. The Telegraph. Diakses pada 15 Maret 2019, melalui <<https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/israel/9287715/Israeli-anti-immigration-riots-hit-African-neighbourhood-of-Tel-Aviv.html>>.
- HIAS. (n.d.). *Talking Points: Asylum Seekers in Israel*. HIAS. Diperoleh pada 12 Mei 2018, melalui <https://www.hias.org/sites/default/files/hias_israel_african_asylum_seekers_talking_points_and_recommendations.pdf>.
- History.com Editors. (2018). *Israel*. A&E Television Networks. Diakses pada 7 Maret 2019, melalui <<https://www.history.com/topics/middle-east/history-of-israel>>.
- Israel, G. (2017). *Why Israel's Border Fence Worked*. MIDA. Diakses pada 15 Maret 2019, melalui <<https://mida.org.il/2017/02/21/israels-border-fence-worked/>>.
- Jewish Virtual Library. (n.d.). *The Holocaust Wing*. Jewish Virtual Library A Project of AICE. Diakses pada 7 Maret 2019, melalui <<https://www.jewishvirtuallibrary.org/the-holocaust>>.
- Kaplan, S. & Salamon, H. (1998). *Ethiopian Immigrants in Israel: experiences and prospects*. The Institute for Jewish Policy Research (JPR). Diperoleh pada 7 Maret 2019, melalui <<https://www.jpr.org.uk/documents/Ethiopian%20immigrants%20in%20Israel:%20experience%20and%20prospects.pdf>>.
- Kershner, I. (2018). *Israel Offers African Migrants a Choice: Ticket Out or Jail*. The New York Times. Diakses pada 10 Mei 2018, melalui <<https://www.nytimes.com/2018/01/04/world/middleeast/israel-africans.html>>.
- Kubovich, Y. (2012). *Israel Police: Unemployed African Refugees Turning Tel Aviv Beaches Into High Crime Spots*. Haaretz. Diakses pada 14 Maret 2019, melalui

- <<https://www.haaretz.com/1.5218705>>.
- Lidman, M. (2018). *10 key questions about Israel's African asylum seeker controversy*. The Times of Israel. Diakses pada 10 Mei 2018, melalui <<https://www.timesofisrael.com/in-israels-new-plan-to-deport-africans-details-abound/>>.
- Lidman, M. (2018). *Large migrant detention center to close at midnight amid deportation plan*. The Times of Israel. Diakses pada 15 Maret 2019, melalui <<https://www.timesofisrael.com/large-migrant-detention-center-to-close-at-midnight-amid-deportation-plan/>>.
- Lior, I. (2010). *Hundreds in Tel Aviv Call for Deportation of Foreign Workers, Refugees*. Haaretz, diakses pada 15 Maret 2019, melalui <<https://www.haaretz.com/1.5096925>>.
- Lior, I. (2010). *Hundreds Protest Against Presence of Foreigners, Refugees in South Tel Aviv*. Haaretz. Diakses pada 14 Maret 2019, melalui <<https://www.haaretz.com/1.5097061>>.
- Lior, I. (2016). *'Still Better Than Africa': Inside Israel's Detention Camp for Migrants*. Haaretz, Diakses pada 1 April 2019, melalui <<https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-MAGAZINE-still-better-than-africa-inside-israel-s-detention-camp-for-migrants-1.5472492>>.
- Livi, M. K. & Rozen, S. (2014). *From One Prison to Another Holot Detention Facility*. Diperoleh pada 1 April 2019, melalui <<https://hotline.org.il/wp-content/uploads/Report-Holot-061514.pdf>>.
- Loescher, G. (1992). *Refugee Movement and International Security*, Adelphi papers No. 268. IISS, Brassey's London.
- Mekelberg, Y. (2015). *The plight of Ethiopian Jews in Israel*. BBC News. Diakses pada 7 Maret 2019, melalui <<https://www.bbc.com/news/world-middle-east-32813056>>.
- Nichols, R. & Jacobsen, K. (2011). *Africa Migration to Israel Debt, Employment and Remittances*. Feinstein International Center.
- Nichols, R. & Jacobsen, K. (n.d.). *African Refugees in Israel*. Forced Migration Review. Diperoleh pada 10 Januari 2019, melalui <<https://www.fmreview.org/sites/fmr/files/FMRdownloads/en/non-state/55-56.pdf>>.
- Polak, D. N. (2010). *Tel Aviv Rabbis: Renting Apartments to Foreign Workers Violates Jewish Law*. Haaretz. Diakses pada 1 April 2019, melalui <<https://www.haaretz.com/1.5145919>>.
- Prostitution*. Haaretz. Diakses pada 1 April 2019, melalui <<https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-more-eritrean-asylum-seekers-turning-to-prostitution-1.5449932>>.
- Refugees International, (2018). *Denial of Refuge: The Plight of Eritrean and Sudanese asylum seekers in Israel*. Refugees International. Diakses pada 7 Maret 2019, melalui <<https://www.refugeesinternational.org/reports/2018/4/26/the-plight-of-eritrean-and-sudanese-asylum-seekers-in-israel>>.
- Skop, Y. (2014). *Israel Spending \$29m / Year on Open-air Prison for African Asylum Seekers*. Haaretz. Diakses pada 1 April 2019, melalui <<https://www.haaretz.com/.premium-29m-a-year-to-operate-holot-jail-1.5253749>>.
- The America Team for Displaced Eritreans. (n.d). *Seeking Refuge and Asylum*.

- The America Team for Displaced Eritreans. Diakses pada 7 Maret 2019, melalui <<https://eritreanrefugees.org/surviving-in-israel/>>.
- The Heritage Foundation. (n.d.). *2019 Index of Economic Freedom Israel*. The Heritage Foundation. Diakses pada 14 Maret 2019, melalui <<https://www.heritage.org/index/country/israel>>.
- The Jewish Federations of North America. (2018). *Illegal Migrants & Refugees in Israel Major Trends and Background Information*. The Jewish Federations of North America. Diperoleh pada 6 Januari 2019, melalui < <https://cdn.fedweb.org/fed-42/2212/Migrants%2520to%2520Israel%2520-%2520Full%2520Background%2520Briefing%2520February%25209%25202018.pdf> >.
- The Knesset. (n.d.). *The State of Israel as a Jewish State*. The Knesset. Diakses pada 7 Maret 2019, melalui <<https://knesset.gov.il/constitution/ConstitutionJewishState.htm>>.
- UNHCR. (2017). *Figures at a Glance*. Dilihat 7 Mei 2018, <<http://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html>>.
- United States Holocaust Memorial Museum. n.d. *Refugees*. United States Holocaust Memorial Museum. Diakses pada 7 Maret 2019, melalui <<https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/refugees>>.
- Weiss, M. (2018). *Israel's offer to African asylum seekers: leave or be jailed*. The Irish Times. Diakses pada 14 Maret 2019, melalui <<https://www.irishtimes.com/world/middle-east/israel-s-offer-to-african-asylum-seekers-leave-or-be-jailed-1.3409216>>.
- Yaron, L. (2018). *Israel Begins Expelling Asylum Seekers From Holot Detention Facility*. Haaretz. Diakses pada 15 Maret 2019, melalui <<https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-israel-begins-expelling-asylum-seekers-from-holot-detention-facility-1.5870995>>.
- Yemini, L. A. (2017). *African Asylum-Seekers in Israel: Illegalization, Incorporation and Race Relations*. Hagira. Diperoleh pada 11 Mei 2018, melalui <https://www.ruppin.ac.il/%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8/%D7%94%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%94%D7%92%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%91-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99/%D7%9B%D7%AA%D7%91-%D7%A2%D7%AA-%D7%94%D7%92%D7%99%D7%A8%D7%94/Documents/Hagira_7_new/03%20Anteby-clean.pdf >.
- Zonszein, M. (2015). *Israel to deport Eritrean and Sudanese asylum seekers to third countries*. The Guardian. Diakses pada 15 Maret 2019, melalui <<https://www.theguardian.com/world/2015/mar/31/israel-to-deport-eritrean-and-sudanese-asylum-seekers-to-third-countries>>.

